**PENGARUH PEMBAGIAN TUGAS DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI**

**PADA KANTOR PEMERINTAH KABUPATENBAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Tommy Langkis1, dan Damai Darmadi2**

**1Administrasi Negara, Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.**

**2Dosen Fisipol, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75124, Indonesia.**

**E-Mail: tommylangkis@untag-smd.ac.id**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah Pembagian Tugas ada hubungannya dengan Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Oleh karena itu penulis memperoleh gambaran tentang pembagian tugas dan efektivitas kerja pegawai itu penting sekali agar para pegawai lebih memahami lagi secara mendalam mengenai konsep Administrasi Negara dalam konteks pembagian tugas guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas secara baik dilingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Sekalipun pembagian tugas bukanlah satu-satunya faktor yang mendukung keberhasilan untuk menciptakan efektivitas kerja pegawai, namun ternyata faktor pembagian tugas cukup mempengaruhi efektivitas kerja pegawai.

Selaku Pimpinan disarankan agar lebih banyak lagi mencurahkan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan individu pegawainya, serta memberikan

kebebasan bagi pegawainya untuk mengembangkan kreativitas mereka, serta memberikan pengalaman yang lebih luas kepada para pegawai melalui kegiatan pengembangan yang kontinyu. Dan Kepada para pegawai, khususnya yang dijadikan responden di dalam penelitian ini, disarankan agar terus meningkatkan semangat kerja dan kemampuan dalam membawa misi organisasi di bawah tingkat kompetisi yang semakin ketat, sehingga akan tercipta baik, yang secara simultan dapat meningkatkan performansorganisasi dalam rnenghadapi persaingan global.

**Kata Kunci : Efektivitas Kerja Pegawai**

1. **PENDAHULUAN**

Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah yang dititik beratkan pada pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan dalam pembangunan berkelanjutan, dimana didalam era reformasi memasuki era globalisasi dan berdagangan bebas. Seperti diketahui pembangunan merupakan proses pembaharuan yang berkesinambungan, dalam arti proses yang berlangsung terus menerus dalam setiap sektor serta kehidupan manusia, pembangunan yang sedang berjalan atau berlangsung di wilayah negara lndonesia hingga saat ini masih menuntut kepada semua pihak untuk selalu berusaha lebih meningkatkan pelaksanaan tugas demi terciptanya pembangunan nasional. Untuk itu maka kesadaran akan bernegara hendaknya juga semakin ditingkatkan baik segi obyek didalam pembangunan dalam obyek itu sendiri.

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh suatu bangsa, kegiatan pembanguanan yang dilaksanakan sekarang maupun akan datang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional. oleh sebab itu hasil pembangunan tersebut harus dinikmati seluruh rakyat lndonesia secara merata. Dalam pembangunan kedudukan manusia merupakan suatu hal yang sangat menentukan, karena pada hakekatnya pembangunan nasioanal adalah pembangunan manusia secara utuh baik lahir maupun batin.Olehsebab itu pegawai negeri sebagai aparatur pemerintahan harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Rencana pembangunan tersebut telah ditetapkan dalam tujuan Nasional negara yaitu untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

Salah satu faktor yang menentukan dalam pelaksanaan suatu pembangunan bangsa adalah usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat lndonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/l999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara disebutkanMemberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, dilindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum-hukum dalam tatanan-tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sederhana untuk kurun waktu lama tahun kedepan.

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan pembangunan diperlukan peranan aparatur negara yang bertanggung jawab bersemangat serta adanya sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Aparatur pemerintah dalam hal ini menjadi suatu alat untuk mencapai pembangunan.untuk mendapatkan alat yang efisien, efektif dan beribawa maka aparatur pemerintah perlu dibina dan ditertibkan, hal ini dimaksudkan agar efektivitas kerja aparatur pemerintah itu dapat meningkat.

Efektivitas kerja dimaksudkan agar pencapaian tujuan tepat pada waktunya dengan kata lain sesuai dengan rencana. Di dalam melaksanakan pembangunan, satah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pembinaan kerja aparatur adalah efektivitas. Seperti dinyatakan di dalam undang-undang Republik lndonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 12 Tentang perubahan UU No. 8 Tahun, ( 2000 - 6 ). salah satu butimya, disebutkan : Manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Aparatur negara sebagai pelaksana memegang tugas yang sangat berat, dimana terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun sebagai penyelenggara tentunya harus memiliki mental dan pengabdian yang tinggi sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 30 Tahun 1980 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
2. Mentaati ketentuan jam kerja.
3. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
4. Menciptakan dan memelihara susunan kerja yang baik.
5. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut tugasnya masing-masing.
6. **PERMASALAHAN**

Apakah Pembagian Tugas berpengaruh dengan efektivitas kerja pegawai padaKantor Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur ?

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian penulisan skripsi yang penulis lakukan ini adalah penelitian verifikatif atau uji hipotesis, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan atau mencari sebab akibat daridua variabel atau lebih. Dengan demikian penulisan ini bersifat menerangkan, yaitu untuk mengetahui hubungan antara pembagian tugas dengan efektivitas pegawai pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Menurut pendapat Sudjana, (1997:45) mengatakan sebagai berikut: “Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif atau kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang lengkap dan nyata”. Dari segi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2001:889) mengatakan sebagai berikut: “Populasi adalah Sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau suatu kumpulan yang memenuhui syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapt ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung kuantitatif maupun kualitatif dari sekumpulan obyek yang lengkap dan nyata.

Untuk menganalisis data yang dihimpun dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik, caranya dengan terlebih dahulu membuat tabel rangkuman dari hasil jawaban responden Untuk meganalisis data variabel pembagian tugas dan efektivitas kerja pegawai yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Product Moment Sutrino Hadi (1987-273). dengan rumus sebagai berikut :



Keterangan :

*rxy* = Koefisien Korelasi antara gejala X dan Y

Σ*xy* = Jumlah product moment dari X dan Y

X = selisih antara frekuensi/skor darigejara X dengan rata - rata ( Mx)

Y = selisih antara frekuensi/ skor dari gejala Y dengan rara-rata ( My)

Sebelum rumus tersebut diatas dioperasikan, lebih dahulu dibuat tabel persiapan, sebagai berikut ;

Tabel 1. Tabel persiapan untuk mencari korelasi X dan y

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No  Subyek | X | X | X2 | Y | Y | Y2 | XY |
| Total | | | | | | | |



lnterprestasi dari korelasi tersebut diatas menurut ukuran konservatif adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| r | Interprestasi |
| Antara 0,800-1000 | Tinggi |
| Antara 0,600 -0,800 | Cukup |
| Antara 0,400-0,600 | Rendah |
| Antara 0,200-{,400 | Agak Rendah |
| Antara 0.00H.200 | Sangat Rendah |

Untuk menginter prestasikan hasil kooefisien korelasi antara independen variabel dengan dependen variabel, maka dilakukan test signifikansinya dengan cara membandingkan hasil koefisien korelasi yang diperoleh ( r x y empiris ) dengan harga kritis r xy tabel ( r xy teoritis) pada kepercayaan 95% atau α 0,05. Apabila hasil koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari harga kritis r xy.

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukannya kesamaan persepsi dan langkah terintegrasi serta menyeluruh dari unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah;

Maksud Dan Tujuan di dalam Pengelolaan barang milik daerah yaitu:

* 1. Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Daerah melalui kesamaan persepsi dan langkah secara integral dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Daerah.

Pejabat pengelola barang milik daerah adalah Bupati, dan pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
2. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
3. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
4. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
6. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah.

Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah Kepala SKPD selaku pengguna barang barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab diantaranya: Mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

**4.2. Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis menyajikan data data variabel Pembagian Tugas dan Efektivitas Kerja Pegawai pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden.

Untuk mengukur varibel Pembagian tugas digunakan 3 (tiga) indikator dan setiap indikator dijabarkan dalam 2 (dua) pertanyaan. Demikian juga untuk mengukur variabel Efektivitas Kerja penulis menggunakan 3 (tiga) indikator dan setiap indikator dijabarkan dalam 2 (dua) pertanyaan serta setiap pertanyaan penulis menyediakan 5 (lima) jenjang jawaban yaitu sebagai berikut :

* Bila responden menjawab a, diberi nilai 5
* Bila responden menjawab b, diberi nilai4
* Bila responden menjawab c, diberi nilai 3 - Bila responden menjawab c, diberi nilai 2
* Bila responden menjawab c, diberi nilai 1

**4.3. Analisa dan Pembahasan**

Setelah seluruh data pembagian tugas dan efektivitas kerja diuraikan sebelumnya,maka berikut pada Bab V ini penulis kembali akan melanjutkan dengan menganalisis data tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada penulisan skripsi ini penutis menggunakan analisis Korelasi Product Moment. Penulis berharap ada hubungan dari kedua variabel yang diteliti, yaitu hubungan sebab akibat dari variabel pembagian tugas dan variabel efektivitas keria. 32

Untuk mempermudah analisis data, penulis terlebih dahulu menyiapkan data kedalam bentuk tabel persiapan untuk mencari antara X dan Y, sedangkan identitas pegawai dinyatakan dalam bentuk n1 , n2 , n3 , ..nk. Dan untuk semangat keria dinyatakan dalam bentuk y 1 , y 2 , y 3 , …..x y

Berikut ini merupakan data-data yang telah penulis rangkumkan dan sajikan kedalam bentuk tabel antara (X) dan (Y).

Tabel 8. Rangkuman Data Skor Jawaban Untuk Variabel Pembagian Tugas (X) dan Efektivitas Kerja (Y).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Resp | Pembagian Tugas (X) | | | Total Skor | Efektivitas Kerja (Y) | | | Total Skor |
|  | 1 2 | | 3 | | 1 | 2 | 3 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | 10 |

Selanjutnya total skor dalam teori diatas diproses dalam tabel persiapan sebagai berikut :

Tabel 9. Tabel Persiapan untuk mencari korelasi antara pembagian tugas ( X ) dan Efektifttas keria ( Y ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.Resp | X | X | X2 | Y | Y | Y2 | XY |
| 1 | 10 | -0,40 | 0,16 | 10 | -0,65 | 0,42 | 0,26 |
| 2 | 10 | -0,40 | 0,16 | 10 | -0,65 | 0,42 | 0,26 |
| 3 | 13 | 2,60 | 6,76 | 11 | 0,35 | 0,35 | 0,91 |
| 4 | 9 | -1,40 | 1,96 | 13 | 2,35 | 2,35 | 3,29 |
| 5 | 11 | 0,60 | 0,36 | 9 | -1,65 | 2,72 | 0,99 |
| 6 | 13 | 2,60 | 6,76 | 10 | -0,65 | 0,42 | 1,69 |
| 7 | 11 | 0,60 | 0,36 | 11 | 0,35 | 0,12 | 0,21 |
| 8 | 12 | 1,60 | 2,56 | 10 | -0,65 | 0,42 | 1,04 |
| 9 | 10 | -0,40 | 0,16 | 11 | 0,35 | 0,12 | 0,14 |
| 10 | 10 | -0,40 | 0,16 | 11 | 0,35 | 0,12 | 0,14 |
| 11 | 12 | 1,60 | 2,56 | 10 | -0,65 | 0,42 | 1,04 |
| 12 | 8 | -2,40 | 5,76 | 12 | 1,35 | 1,82 | 3,24 |



****

Berdasarkan pada pengujian dari rumus Koefisien Product Moment , maka terlihat harga ( r ) sebesar O,7. Melaluitabel harga kritik r untuk menguji signifikansi ( terlampir ), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Harga r = O,7 N = 17 Dari r XY empiris sebesar 0,7 dimana r XY dari tabel nilai-nilai r Product Moment untuk N = 17 yakni nilai signifikansi ( taraf kepercayaan 95 %) yaitu 0,482, maka diketahui r XY > empiris Dari r XY sebagaimana terlampir pada tabel. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan positif antara pembagian tugas (X) dan efektivitas kerja (Y) .

**5.1. Kesimpulan**

Setelah disajikan datadata hasil penelitian dalam bentuk tabel dan dianalisis hingga sampai tahap pengujian. Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berhasil dihimpun di lapangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis diketahui Variabel pembagian tugas (X) mempunyai hubungan sebab akibat yang sangat kuat dengan variabel efektivitas Kerja Pegawai (Y), hal ini dapat dilihat dari hasil koefesien korelasi Product Moment dimana r XY empiris ( 0,7 ) > r XY tabel ( 0,482 ). Ini berarti bahwa hipotesis yang penulis kemukakan dapat diterima kebenarannya oleh data.
2. Sekalipun pembagian tugas bukanlah satu-satunya faktor yang mendukung keberhasilan untuk menciptakan efektivitas kerja pegawai, namun ternyata faktor pembagian tugas cukup mempengaruhi efektivitas kerja pegawai. Hal ini terlihat bila dari hasil pengujian hipotesis di interprestasikan, dimana 0,7 terletak diantara 0,800 - 0,1000.

**5.2. Saran – Saran**

Beberapa saran yang perlu penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 37

1. Kepada Bapak Kepala Pemerintah Kabupaten Bagian Perlengkapan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Pimpinan disarankan agar lebih banyak lagi mencurahkan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan individu pegawainya, serta memberikan kebebasan bagi pegawainya untuk mengembangkan kreativitas mereka, serta memberikan pengalaman yang lebih luas kepada para pegawai melalui kegiatan pengembangan yang kontinyu.
2. Kepada para pegawai, khususnya yang dijadikan responden di dalam penelitian ini, disarankan agar terus meningkatkan semangat kerja dan kemampuan dalam membawa misi organisasi di bawah tingkat kompetisi yang semakin ketat, sehingga akan tercipta baik, yang secara simultan dapat meningkatkan performans organisasi dalam rnenghadapi persaingan global.
3. 3. Bagi para peneliti yang berminat untuk mengkaji dan meneliti ulang penelitian ini, disarankan untuk lebih memperdalam dan memperluas variabel-variabel penelitian, indikator-indikator penelitian, memperluas wilayah kajian dan obyek yang diteliti dan memperdalam kerangka teoritis sehingga makin memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi.

**BIBLIOGRAFI**

Anonim, Bahan Penataran dan Bahan Referensi, Jakarta, 1993.

-----------, Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

-----------, Peraturan Pemerintah Rl Nomor 30 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Ghalia lmdonesia, Jakarta, 1980.

A.G Pringgodigdo, Ensiklopendi Umum, Yayasan Kanisius, Jakarta. 1984.

Alex S. Nitisemito, Management Suatu Dasar dan Pengantar, Penerbit Samito Bros, Jakarta, 1984.

Achmad lchan, Tata Administrasi Karyawan, Djambatan, Karyawan, Jakarta, 1984.

Bennet N.B. Silalahi, Perencanaan Pembinaan Tenaga Kerja, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1985.

Chester I Bardnard, Fungsi Eksekutif, Penerbit Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1985.

G.R. Terry, Azas-Azas Management, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

G.F. Thomson, Meningkatkan Kualitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985.

H. Rosyidi, Organisasi dan Manajemen, Penerbit Alumni Bandung, 1984.

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1983.

Kartini Kartono, Metodologi Research Sosial, Penerbit Alumni Bandung, 1984.

M.C. Barnes dkk., Organisasi Perusahaan Teori dan Praktek, Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Jakarta, 1984.

M. Manulang, Dasar-Dasar Management, Penerbit Ghalia lndunesia, Jakarta, 1984.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian survai, Lp3ES, Jakarta, 1985.

Michael E. MicGill, Buku Pedoman Pengembangan organisasi, pr Pustaka Binaman Presindi, Jakarta, 1986.

Richard M. Strees, Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta, 1985. soedono soekanto, sosiologi suatu pengantar, yayasan penerbit Ul, Jakarta, 1985.

soewarno Handayaningrat, Pengantar sfuili llmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

s.P. siagian, organisasi, Kepemimpinan dan prilaku Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1gBS.

sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, penerbit Fakultas psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.

sumadi suryabrata, Metode Penelitian, penerbit Rajawali, Jakarta, 1985.

Sudjana, Metcde Statistik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1986.

The Liang Gie, Kamus Administrasi, penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1986.

Usman Tampubolon, Metodologi Penelitian Administrasi, Fakultas Sospol UGM, Yogyakarta, 1984.

winarno surachmad, Pengantar llmu Dasar dan Metode, penerbit Jemmars, Bandung, 1984.

w.J.s. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa lndonesia, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1 983.

Drs. I.G Wursanto, *Manajemen Kepegawaian 1*, Penerbit Kanisius, Surabaya, 1995

Pariata Westra, *Beberapa Masalah di Dalam Hubungan Kerja Kemanusiaan*, Balai Pembinaan Administrasi UGM, Yogyakarta, 1991

J.H. Hutagalung, *Unsur Ekonomi Modern Jilid 1*, Cetakan IV, Penerbit Bharata, Jakarta, 1982

Paiman J. Simanjutak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia,* Penerbit LPFE-UI, Jakarta, 1995

International Labour Office, *Penelitian Kerja Karyawan Edisi Pertama*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985

Drs. Komaruddin, *Kamus Riset*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1994

Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1994

Drs. Husain Umar, SE, MM, MBA, Riset Sumber Sumber Daya Manusia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Saifuddin Aswar, MA, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 1998

Sudjana, *Metode statistik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1997

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial* Cetakan Keempat, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni Bandung, 1990